

**INVENTARISASI PENGAJIAN PRODUK HUKUM TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>PRODUK HUKUM YANG DIKAJI</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENGAMPU</b>	<b>PELAKSANAAN</b>	<b>HASIL KAJIAN</b>	<b>OUT PUT</b>
1.	<p>1. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014</p> <p>2. Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014</p>	Dinas Sosial	26 Pebruari 2019	Diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0004837 tanggal 11 Maret 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014
2.	<p>3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak</p>	BPPD	28 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda dimaksud</li> <li>- Terhadap perencanaan perubahan tariff dapat dilakukan</li> </ul>	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0002067 tanggal 6 Pebruari 2018 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Daerah Provinsi Jawa Tengah				
	<p>4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999</p> <p>5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009</p> <p>6. PERda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012</p> <p>7. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	Biro Perekonomian	28 Januari 2019	<p>1. Perda Huruf a sampoai dengan huruf c perlu disusun perda baru dengan mendasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD</p> <p>2. Perda pada huruf d perlu ditindaklanjuti dengan Pergub sebagai pelaksanaannya</p>	Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 287/SEK/HK tanggal 4 Pebruari 2019 perihal Pengkajian Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
3.	8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	4 April 2019	Diundangkannya : 1. PP Nomor 24 Tahun 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektrnoik 2. PermenKop UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Berkoperasi 3. Permenkop UKM Nomor 11 Tahun 2018 ttg Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0008042 tanggal 22 April 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013
4.	9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional	Dinas Perhubungan	5 April 2019	KP 432 Tahun 2017 perlu diselaraskan dalam perencanaan sektoral pelabuhan dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan perencanaan tara ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0009328 tanggal 26 April 2019 perihal Hasil Pengkajian Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
5.	10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kominfo	10 Mei 2019	Dengan diundangkannya PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, maka Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 perlu diubah khususnya pada Lampiran I, II dan III.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0011192 tanggal 22 Mei 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
6.	11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kehutanan	15 Mei 2019	Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 perlu diubah khususnya terkait kewenangan Provinsi dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0011694 tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
7.	<p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</p>	DP3AKB	24 Juli 2019	<p>Dengan adanya perkembangan regulasi Nomor antara lain :</p> <p>a. UU Nomor 23 Tahun 2014</p> <p>b. UU Nomor 35 Tahun 2014</p> <p>Harmonisasi dan sinkronisasi serta efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan Perda bidang perlindungan anak sehingga perlu diintegrasikan pengaturan mengenai Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak</p>	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0018621 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013
8.	14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun	Dinas Tenaga Kerja dan DP3AKB	29 Juli 2019	Adanya perkembangan regulasi yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 35 Tahun 2014	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0018620 tanggal 26 Agustus

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Provinsi Jawa Tengah			dan Perpres 176 Tahun 2014 Harmonisasi dan sinkronisasi serta efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan Perda bidang perlindungan anak sehingga perlu diintegrasikan pengaturan mengenai Penanggulangan Pekerja Anak dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007
9.	15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi 16. Peraturan Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan dan BAPPENDA	22 Agustus 2019	Perlu dilakukan pencabutan atas kedua Peraturan Daerah dimaksud sehubungan dengan diundangkannya: 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : a. 180/0020051 tanggal 9 September 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 b. 180/0020052 tanggal

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi			2. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9 September 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003
10.	17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kesehatan	11 September 2019	Perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Gubernur dimaksud sehubungan dengan diundangkannya Perpres Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 75 Tahun 2006	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0020207 tanggal 23 September 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016
11.	18. Peraturan Gubernur Jawa	Dinas Perhubungan	16 Oktober 2019	Perlu dilakukan pencabutan atas	a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	<p>Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan</p> <p>19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Logo Institusi Pendidikan Bagi Akper Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>dan Dinas Kesehatan</p>		<p>Peraturan Gubernur dimaksud sehubungan dengan diundangkannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<p>Tengah Nomor 180/0024071 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012</p> <p>b. Nota Dinas Sekda kepada Biro Organisasi Nomor 180/0024071 tanggal 30 Oktober 2019</p>
<b>12.</b>	<p>20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Dinpermasdesd ukcapil</p>	<p>4 Nopember 2019</p>	<p>Perlu ditindaklanjuti penyusunan Peraturan Gubernur sebagai</p>	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0027257</p>



NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PELAKSANAAN	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			amanat petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018	tanggal 25 Nopember 2019 perihal Hasil Pengkajian Perda Nomor 4 Tahun 2018
	21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energy Daerah	Dinas ESDM	4 Nopember 2019	Perlu ditindaklanjuti penyusunan Peraturan Gubernur sebagai amanat petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0027258 tanggal 25 Nopember 2019 perihal Hasil Pengkajian Perda Nomor 12 Tahun 2018